RINGKASAN

Taufiq 247410101021	Proses Penegakan Hukum Terhadap Penetapan Peran Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Subulussalam

(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Prof. Dr. Malahayati, S.H., LL.M)

Tindak pidana narkotika merupakan segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.** Tindak Pidana Narkotika merupakan permasalahan serius yang mengancam aspek kesehatan, sosial, keamanan, dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika, penyidik Polres Subulussalam memiliki peran penting untuk menetapkan peran pelaku secara tepat, apakah sebagai pengguna, penguasa atau penjual narkotika, karena penetapan tersebut menentukan penerapan pasal, jenis sanksi yang akan diterapkan terhadap pelaku tersebut.

Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam dan menganalisis faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam menetapkan peran pelaku narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam

Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah teknik penelitian lapangan. Analisis data dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan 4 (empat) tahap meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Proses penegakan hukum dalam menetapkan pelaku sebagai penjual narkotika di Polres Subulussalam belum optimal karena penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih didasarkan pada pengakuan tersangka yang ikut membeli narkotika dan barang bukti narkotika tanpa didukung alat bukti lain yang membuktikan adanya transaksi jual beli yang dilakukan tersangka. Faktor yang memengaruhi penetapan peran pelaku narkotika di Polres Subulussalam adalah keterbatasan alat bukti dan keterangan tersangka. Sehingga penyidik salah mentafsirkan peran tersangka yang mengakibatkan perbedaan antara hasil penyidikan dan putusan hakim, di mana dakwaan Pasal 114 sering tidak terbukti dan pelaku hanya dinyatakan melanggar Pasal 111 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disarankan agar penyidik menetapkan peran tersangka berdasarkan kesesuaian dan kecukupan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Disarankan penyidik dapat mencari alat bukti elektronik yang telah dihilangkan oleh tersangk.

Kata Kunci: Penetapan, Tersangka, Tindak Pidana, Narkotika